

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2025



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Demang Lebar Daun No.4864 Palembang

**e-mail: balitbang@sumselprov.go.id, Website
: www.litbangda.sumselprov.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya,sehingga Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, RPD dan Renstra 2024-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hamper setiap tahun berdasarkan rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun2025 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami berusaha mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun2025, walaupun demikian, masukan dan saran perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat untuk Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan.

**PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH,**



Ir. BASYARUDDIN AKHMAD, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197008041994021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BABI Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	4
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan	5
1.3 Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	6
 BABII Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	 7
 BABIII Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025	 12
 BABV Penutup.....	 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Balitbangda dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah:

- a. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. Sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, serta Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Untuk menjaga konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Balitbangda Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Prov. Sumsel Tahun 2025 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
4. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugasdan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana table Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasional sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BABIV PENUTUP

BAB II

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Balitbangda tahun 2025 :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Balitbangda Tahun 2025

[illegible]

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Balitbangda s.d 30 Agustus 2025

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		PaguAnggaran (Rp)	RealisasiKeuangan (%)	RealisasiFisik (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		20.462.758.982	40,71	54,38
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.500.000	0,00	70,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	0,00	75,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	0,00	75,00
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	0,00	60,00
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.874.041.966	49,37	50,01
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.689.541.966	37,33	37,33
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.500.000	37,46	52,00
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	7,81	10,00
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	0,00	30,00
	8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000	0,00	30,00
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.500.000	0,00	0,00
	9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.500.000	0,00	50,00
	10	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	0,00	50,00
	11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	0,00	50,00

	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.500.000	0,00	50,00
	12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	0,00	50,00
	13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.000.000	0,00	50,00
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.018.846	11,90	50,00
	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	0,00	50,00
	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.296.752	9,39	50,00
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	20,82	50,00
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	0,00	50,00
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.222.094	13,20	50,00
	19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.500.000	0,00	50,00
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.215.000.000	0,00	50,00
	20	Pengadaan Mebel	25.000.000	0,00	50,00
	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.190.000.000	3,10	50,00
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.598.170	62,66	65,00
	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	0,00	60,00
	23	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	550.000.000	45,45	60,00
	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.345.098.170	70,01	75,00
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.600.000	3,89	50,00
	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.000.000	35,80	50,00
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.000.000	2,06	50,00
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.600.000	12,42	50,00

	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	0,00	50,00
	29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0,00	50,00
II	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1.587.420.000	3,33	37,75
	i	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	319.170.000	9,75	25,00
	30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	31.200.000	0,00	00,00
	31	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	38.000.000	41,14	30,00
	32	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	84.700.000	0,00	30,00
	33	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	63.270.000	0,00	30,00
	34	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	34.500.000	0,00	30,00
	35	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	67.500.000	22,92	30,00
	ii	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	72.400.000	0,00	50,00
	36	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	36.500.000	0,00	50,00
	37	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	35.900.000	0,00	50,00
	iii	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	515.140.000	1,05	46,00
	38	Penelitiandan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35.900.000	0,00	50,00

	39	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	265.340.000	0,00	50,00
	40	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	86.100.000	3,86	50,00
	41	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	97.600.000	2,15	50,00
	42	Penelitiandan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.200.000	0,00	30,00
	iv	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	680.710.000	2,40	30,00
	43	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	92.350.000	0,00	30,00
	44	UjiCoba dan Penerapan RancangBangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	151.300.000	0,00	30,00
	45	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	109.060.000	0,00	30,00
	46	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	311.200.000	5,26	30,00
	47	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	16.800.000	0,00	30,00
TOTAL			22.050.178.982	38,02	46,06

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan.

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2025 sampai dengan Agustus 2025) keseluruhan anggaran murni Balitbangda Prov.Sumsel pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 22.050.178.982,-**

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program bahwa capaian fisik sebesar 46,06% sampai dengan 30 Agustus 2025, sedangkan capaian keuangan sebesar 38,02% dari target yang direncanakan sampai dengan 30 Agustus 2025, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output disub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan agar mencapai target 100% di akhir tahun.

BABIII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN

2025

Adapun Rencana Program Dan kegiatan dalam perubahan Rencana kerja (Renja) Perangkat daerah tahun 2025 tidak lepas dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran Sebelum (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah (Rp)	Berkurang/Bertambah
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		20.462.758.982	19.559.895.016	902.863.966
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.500.000	108.700.000	(59.200.000)
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	99.200.000	(59.200.000)
	2	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.500.000	-
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	-
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.874.041.966	12.975.878.000	898.163.966
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.689.541.966	12.791.378.000	898.163.966
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.500.000	127.500.000	-
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	50.000.000	-
	7	KoordinasidanPenyusunanLaporanKeuanganAkhirTahun SKPD	3.500.000	3.500.000	-
	8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000	3.500.000	-
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.500.000	15.500.000	0,00
	9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.500.000	3.500.000	-
	10	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	-
	11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	7.000.000	-
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.500.000	41.500.000	50,00
	12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	22.500.000	-

	13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.000.000	19.000.000	38.000.000
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.018.846	521.368.846	50,00
	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	-
	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.296.752	118.296.752	-
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	85.000.000	(15.000.000)
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	-
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.222.094	259.572.094	22.650.000
	19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.500.000	3.500.000	-
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.215.000.000	3.289.350.000	(74.350.000)
	20	Pengadaan Mebel	25.000.000	25.000.000	-
	21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	45.500.000	(45.500.000)
	22	PengadaanSaranadanPrasaranaPendukungGedung Kantor atauBangunanLainnya	3.190.000.000	3.218.850.000	(28.850.000)
	vii	PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah	1.901.598.170	1.810.598.170	91.000.000
	23	PenyediaanJasa Surat Menyurat	6.500.000	6.500.000	-
	24	PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik	550.000.000	479.000.000	71.000.000
	25	PenyediaanJasaPelayananUmum Kantor	1.345.098.170	1.325.098.170	20.000.000
	viii	PemeliharaanBarangMilik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	798.600.000	797.000.000	1.600.000
	26	PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaandanPajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan	308.000.000	308.000.000	-
	27	PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, PajakdanPerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan	97.000.000	83.500.000	13.500.000
	28	PemeliharaanPeralatandanMesin Lainnya	123.600.000	135.500.000	(11.900.000)
	29	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunanLainnya	70.000.000	70.000.000	-
	30	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana danPrasaranaPendukungGedung Kantor atauBangunanLainnya	200.000.000	200.000.000	-

II	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1.587.420.000	1.547.370.000	40.050.000
	i	PenelitiandanPengembanganBidangPenyelenggaraanPemerintahandanPengkajianPeraturan	319.170.000	287.970.000	31.200.000
	31	Fasilitasi, PelaksanaandanEvaluasiPenelitiandanPengembanganBidangPenyelenggaraanOtonomi Daerah	31.200.000	0	31.200.000
	32	Fasilitasi, PelaksanaandanEvaluasiPenelitiandanPengembanganBidangKelembagaanKetatalaksanaan	38.000.000	38.000.000	-
	33	Fasilitasi, PelaksanaandanEvaluasiPenelitiandanPengembanganBidangAparaturdanReformasiBirokrasi	84.700.000	84.700.000	-
	34	Fasilitasi, PelaksanaandanEvaluasiPenelitiandanPengembanganBidangKeuanganAset Daerah, ReformasiBirokrasi	63.270.000	63.270.000	-
	35	Pengelolaan Data KelitbangandanPeraturan	34.500.000	34.500.000	-
	36	PerumusanRekomendasiAtasRencanaPenetapanPeraturanBarudan/atauEvaluasiterhadapPelaksanaanPeraturan	67.500.000	67.500.000	-
	ii	PenelitiandanPengembanganBidangSosialdanKependudukan	72.400.000	72.400.000	-
	37	PenelitiandanPengembanganKesehatan	36.500.000	36.500.000	-
	38	PenelitiandanPengembanganPartisipasi Masyarakat	35.900.000	35.900.000	-
	iii	PenelitiandanPengembanganBidang Ekonomi dan Pembangunan	515.140.000	515.140.000	-
	39	PenelitiandanPengembanganKoperasi, Usaha Kecil danMenengah	35.900.000	35.900.000	-
	40	PenelitiandanPengembanganPertanian, Perkebunan dan Pangan	265.340.000	265.340.000	-
	41	PenelitiandanPengembanganKelautandanPerikanan	86.100.000	86.100.000	-
	42	PenelitiandanPengembanganKehutanan	97.600.000	97.600.000	-
	43	PenelitiandanPengembanganPerumahanKawasanPermukiman	30.200.000	30.200.000	-
	iv	PengembanganInovasiTeknologi	680.710.000	671.860.000	8.850.000
	44	Penelitian, Pengembangan, danPerekayasaan di BidangTeknologidanInovasi	92.350.000	83.500.000	8.850.000

	45	UjiCobadanPenerapanRancangBa ngun/Model ReplikasidanInvensi di BidangDifusilnovasidanPenerapa nTeknologi	151.300.000	151.300.000	-
	46	DiseminasiJenis, ProsedurdanMetodePenyelengga raanPemerintahan Daerah yang BersifatInovatif	109.060.000	109.060.000	-
	47	SosialisasidanDiseminasiHasil- HasilKelitbangan	311.200.000	311.200.000	-
	48	FasilitasiHakKekayaanIntelektual	16.800.000	16.800.000	-
TOTAL			22.050.178.982	21.107.265.016	942.913.966

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 30 Agustus 2025, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan untuk dibuat rencana kerja perubahan tahun 2025. Meskipun perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti :

- 1. Adanya Kesalahan Kode Rekening,
- 2. Keterlambatan pelaksanaan Kegiatan, dan
- 3. Belanja yang masih kondisi terhutang.

Faktor tersebut di atas memerlukan pencermatan untuk diadakan rencana kerja perubahan tahun 2025. Hal ini juga merupakan salah satu cara penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja sebagai hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya didalam Dokumen LKJiP, dimana rencana kerja Perubahan diperlukan apabila perencanaan diawal tahun tidak berjalan sesuai harapan, sehingga perlu perubahan untuk mencapai target yang telah ditentukan, sesuai hasil assessment (LHE 2024).

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Agustus 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target bertujuan untuk Perbaikan Kinerja sehingga tepat sasaran dan indikator.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dari anggaran semula murni Rp.**22.050.178.982,-** menjadi anggaran perubahan Rp. **21.107.265.016,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Palembang, 05 September 2025

PLT KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

The image shows a circular official stamp of the Balitbangda of the South Sumatra Province. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN" and "BALITBANGDA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
NIP.197008041994021002

